Disparitas Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Pekebun Swadaya: Studi Kasus Kabupaten Siak, Riau

Zulfi Prima Sani Nasution, Ambar Kurniawan dan Ratna Nurkhoiry

ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi pekebun rakyat dari gejolak harga adalah kebijakan penetapan harga pembelian TBS. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin perolehan harga TBS pekebun yang wajar dan mencegah persaingan tidak sehat antar PKS. Kenyataan di lapangan, pembentukan harga TBS di tingkat pekebun swadaya tidak mengikuti ketetapan tersebut, tetapi dipengaruhi oleh harga tim penetapan dan perimbangan penawaran dan permintaan TBS di suatu wilayah. Lemahnya posisi di dalam rantai industri kelapa sawit akibat ketiadaan organisasi kolektif pekebun menimbulkan potensi disparitas harga TBS. Informasi ilmiah terkait disparitas harga TBS di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengukur tingkat disparitas harga TBS pekebun swadaya, b) mengetahui hubungan antara disparitas harga TBS dengan kesejahteraan pekebun, dan c) mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keinginan pekebun bergabung dalam organisasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak, Riau dengan jumlah sampel pekebun swadaya murni sebanyak 71 pekebun yang tersebar di 8 (delapan) desa. Disparitas harga TBS sebesar 10,70% menjelaskan bahwa Kab. Siak mengalami disparitas harga yang tinggi. Namun dari 8 desa sampel, hanya Desa Lubuk Dalam yang mengalami disparitas harga TBS yang tinggi sebesar 9,30%. Nilai disparitas harga TBS yang tidak searah dengan nilai indeks Gini pendapatan usaha sawit pekebun swadaya, baik di tingkat desa maupun kabupaten menjelaskan bahwa terjadinya disparitas harga TBS yang tinggi belum tentu diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan usaha kebun sawit, begitu pula sebaliknya. Sementara keinginan pekebun bergabung dalam organisasi dipengaruhi oleh faktor harga TBS diterima pekebun yang ditentukan oleh kemampuan kelompok dalam mengelola pemasaran TBS secara kolektif.

Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Zulfi Prima Sani Nasution (✉)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan, Indonesia
Email: zulfi_primasani@yahoo.com

PENDAHULUAN

Harga produk pertanian yang stabil adalah kepentingan bersama bagi produsen, konsumen dan juga pemerintah. Agar kegiatan produksi dapat berkelanjutan, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga, seperti harga jatuh pada saat panen raya dan harga melambung pada saat diluar panen raya (Prastowo *et al.*, 2008).

Terkait usaha kelapa sawit, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu kebijakan penetapan harga pembelian TBS yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Acuan harga pembelian TBS (khususnya untuk petani yang bermitra) dihitung menggunakan formulasi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan nilai indeks K, rendemen CPO dan PK menurut umur tanaman, dan harga CPO dan PK. Nilai indeks K ditetapkan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran CPO dan PK serta biaya penyusutan. Tujuan utama penetapan harga pembelian TBS adalah menjamin perolehan harga TBS pekebun yang wajar dan mencegah persaingan tidak sehat antar PKS (Kurniawan et al., 2016). Kenyataan di lapangan, pembentukan harga TBS di tingkat pekebun swadaya tidak mengikuti ketetapan tersebut, tetapi dipengaruhi oleh harga tim penetapan dan perimbangan penawaran dan permintaan TBS di suatu wilayah.

Lemahnya posisi di dalam rantai industri kelapa sawit akibat ketiadaan organisasi kolektif pekebun menimbulkan potensi disparitas harga TBS. Dikhawatirkan disparitas harga TBS semakin menggerus pendapatan pekebun swadaya dan pada

akhirnya berdampak semakin rendahnya insentif pekebun untuk meningkatkan produktivitas kebunnya. Informasi ilmiah terkait disparitas harga TBS diterima pekebun swadaya di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengukur tingkat disparitas harga TBS pekebun swadaya, b) mengetahui hubungan antara disparitas harga TBS dengan kesejahteraan pekebun, dan c) mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keinginan pekebun bergabung dalam organisasi.

METODE

Penelitian dilaksanakan pada Februari 2017 di 8 desa di Kabupaten Siak. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja *(purposive)* dengan pertimbangan Kabupaten Siak merupakan sentra perkebunan rakyat kelapa sawit di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap 71 orang pekebun swadaya murni dengan kepemilikan tanaman berumur kurang dari 10 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner terstruktur.

Kegiatan penelitian diawali dengan mengukur koefisien keragaman *(Coefficient of Variation)* dari harga TBS diterima pekebun swadaya di tingkat kabupaten dan desa. CV umumnya digunakan sebagai indikator disparitas harga (Jati, 2014). Selanjutnya hasil pengukuran tingkat disparitas dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Untuk mengetahui hubungan antara disparitas harga TBS dengan kesejahteraan pekebun, maka dilakukan perhitungan indeks Gini sebagai indikator kesejahteraan pekebun. Nilai indeks Gini berada pada rentang 0 – 1. Mengacu kepada Oshima (1976), tingkat ketimpangan pendapatan dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: (a) rendah bila GC < 0,4; (b) sedang (moderat) bila 0,4 <GC < 0,5; dan (c) tinggi bila GC > 0,5. Selanjutnya hubungan antara disparitas harga TBS dan tingkat ketimpangan pendapatan dianalisis secara kualitatif.

Kegiatan diakhiri dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi keinginan pekebun bergabung dalam organisasi dengan pendekatan regresi logistik. Regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan ketika variabel dependen (respon) merupakan variabel dikotomi. Variabel dikotomi biasanya hanya terdiri atas dua nilai, yang mewakili kemunculan atau tidak adanya suatu kejadian yang biasanya diberi angka 0 atau 1. Data selanjutnya diolah menggunakan program Stata 14 untuk menghasilkan persamaan regresi logistik berupa:

$$Zi = A + B_1X_1 + B_2X_2 + \mu i$$

Keterangan:

Zi = Keinginan pekebun bergabung dalam organisasi (1 = berminat, 0 = tidak berminat)

A = intersep

BI = koefisien regresi

X1 = harga TBS diterima pekebun

X2 = dummy umur tanaman (1 = tanaman 3-6 tahun, 0 = tanaman 7-9 tahun)

μi = error term

HASIL PERBEDAAN

Karakteristik responden

Responden dalam penelitian ini adalah pekebun swadaya murni dengan kepemilikan lahan bervariasi antara 1-8 ha. Ditinjau berdasarkan keikusertaan dalam organisasi, sebesar 62% pekebun di Kabupaten Siak telah bergabung dalam kelompok pekebun. Umumnya kelompok pekebun yang dijumpai, kecuali kelompok di Desa Lubuk Dalam, merupakan hasil binaan petugas PPL dinas penyuluhan Pemda Siak dengan tujuan utama untuk mempermudah pengadaan saprodi berupa pupuk dan mengakomodir pemasaran hasil panen para anggotanya. Kenyataan dilapangan, hanya kelompok pekebun di Desa Dayun yang dapat memasarkan hasil panen TBS para anggotanya. Sementara desa lainnya masih sebatas dalam pengadaan saprodi.

Dari Tabel 2 diketahui bahwa sebagian besar tanaman kelapa sawit pekebun swadaya, baik yang telah bergabung maupun belum bergabung dalam organisasi, berada pada kelompok umur di atas 6 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit swadaya cukup pesat di Kabupaten Siak dimulai sejak tahun 2007/2008. Periode tersebut menjadi periode emas bagi industri kelapa sawit Indonesia dimana harga minyak sawit cukup tinggi.

Tabel 1. Keikutsertaan pekebun dalam organisasi dan saluran pemasaran TBS yang digunakan pekebun menurut desa di Kabupaten Siak

No.	Desa	Organisasi (%)		Saluran Pemasaran (%)			
		Bergabung	Tidak Bergabung	Agen Buah	Ramp	Koperasi	PKS
1	Dayun (n=10)	90	10	20	-	80	-
2	Sungai Niur (n=6)	60	40	67	-	-	33
3	Kotoringin(n=9)	-	100	100	-	-	-
4	Buantan Besar (n=9)	100	-	100	-	-	0
5	Perawang (n=9)	100	-	100	-	-	0
6	Perawang Barat (n=9)	100	-	89	11	-	0
7	Empang Baru (n=10)	30	70	50	-	-	50
8	Lubuk Dalam (n=9)	11	89	89	-	-	11

Sumber: data primer, diolah

Tabel 2. Sebaran umur tanaman kelapa sawit pekebun swadaya menurut keikutsertaan dalam organisasi di Kabupaten Siak

Organisasi	Umur Tanaman (thn)							Total
	3	4	5	6	7	8	9	
Tidak Bergabung	1	1	1	2	5	1	10	21
Bergabung	1	1	0	7	11	4	26	56
Total	**2**	**2**	**1**	**9**	**16**	**5**	**36**	**71**

Sumber: data primer, diolah

Tabel 3. Tingkat disparitas harga tandan buah segar kelapa sawit pekebun swadaya di Kabupaten Siak periode Februari 2017

No.	Desa	Harga TBS diterima Pekebun Swadaya (Rp/Kg)			Disparitas Harga TBS (%)
		Min	Maks	Rerata	
1.	Dayun	1.150	1.350	1.301	6,21
2.	Sungai Niur	1.000	1.200	1.050	7,97
3.	Kotoringin	1.020	1.250	1.152	6,59
4.	Buantan Besar	1.100	1.225	1.177	4,99
5.	Perawang	1.200	1.500	1.311	7,57
6.	Perawang Barat	1.400	1.500	1.423	2,28
7.	Empang Baru	1.250	1.500	1.370	5,85
8.	Lubuk Dalam	1.050	1.450	1.230	9,30
Total		**1.000**	**1.500**	**1.264**	**10,70**

Sumber: data primer, diolah

Disparitas harga tandan buah segar kelapa sawit pekebun swadaya

Data pada Tabel 3 menjelaskan tingkat harga TBS yang diterima pekebun swadaya di Kabupaten Siak selama periode Februari 2017. Harga TBS tertinggi tercatat di Desa Perawang, Desa Perawang Barat dan Desa Empang Baru masing-masing sebesar Rp 1.500,-/kg dan harga TBS terendah tercatat di Desa Sungai Niur sebesar Rp 1.000,-/kg. Hasil perhitungan disparitas harga TBS sebesar 10,70% menunjukkan bahwa Kabupaten Siak mengalami disparitas harga TBS yang tinggi. Namun pada tingkat desa, hanya Desa Lubuk Dalam mengalami disparitas harga TBS yang tinggi sebesar 9,30% .

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya disparitas harga TBS masing-masing desa sampel di Kabupaten Siak dijelaskan sebagai berikut:

a. Desa Dayun, Sungai Niur, Kotoringin, Buantan Besar, Perawang, Perawang Barat dan Empang Baru

Disparitas harga TBS di 7 desa ini tergolong rendah berkisar 2,28-7,97%. Rendahnya disparitas harga TBS di 7 desa ini dipengaruhi oleh faktor keikutsertaan pekebun dalam organisasi. Dari 7 desa ini hanya desa kecuali di Desa Kotoringin yang belum membentuk kelompok pekebun. Sebagai contoh, disparitas harga TBS yang rendah di Desa Dayun dipengaruhi oleh keikutsertaan pekebun dalam organisasi/kelompok yang mampu mengelola pemasaran TBS secara kolektif. Sebesar 80% pekebun menjual TBS nya melalui kelompok yang telah memiliki kontrak kerjasama dengan sebuah PKS. Sementara sisanya menjual TBS nya melalui agen buah, khususnya bagi pekebun yang kebunnya didominasi tanaman muda dengan hasil panen yang belum memenuhi standar olah PKS. Hal ini sejalan dengan pernyataan Singh (2011) bahwa pemasaran secara kolektif dapat mengurangi volatilitas harga dan pada akhirnya mengurangi disparitas harga bagi petani.

Pada kasus Desa Sungai Niur, Kotoringin, Buantan Besar, Perawang, Perawang Barat dan Empang Baru, disparitas harga TBS yang rendah disebabkan adanya persaingan antar agen buah sehingga harga TBS diterima pekebun relatif seragam. Kelompok pekebun yang ada di keenam desa ini masih sebatas pada penyediaan saprodi, dan belum dapat mengakomodir penjualan bersama TBS.

b. Desa Lubuk Dalam

Desa Lubuk Dalam mengalami disparitas harga TBS yang tinggi sebesar 9,30%. Pekebun swadaya di Desa Lubuk Dalam belum bergabung dalam organisasi pekebun terlihat sebanyak 89% pekebun menjual TBS hasil panennya melalui agen buah. Disamping itu, dari hasil kunjungan di lapangan, terdapat 1-2 orang pekebun bermodal besar yang mampu menjual hasil TBS langsung ke PKS. Hal ini lah yang menyebabkan disparitas harga TBS yang tinggi antar pekebun di Desa Lubuk Dalam.

Selain faktor keikutsertaan dalam organisasi pekebun, umur tanaman diduga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perolehan harga TBS pekebun swadaya. Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa menurut umur tanaman, harga TBS yang diterima pekebun swadaya lebih rendah dibandingkan dengan harga pembelian TBS yang ditetapkan oleh Dinas Pekebunan Provinsi Riau dengan selisih berkisar 15 – 34%. Hal ini menjelaskan bahwa harga TBS yang diterima pekebun di lapangan tidak bergantung kepada umur tanaman. Hal ini sejalan dengan Kurniawan et al., 2016 yang menyatakan bahwa harga TBS pekebun swadaya tidak mengikuti harga ketetapan Tim Dinas Perkebunan, melainkan dipengaruhi oleh harga ketetapan Tim penetapan harga, struktur pasar TBS (keseimbangan penawaran dan permintaan TBS) dan posisi pekebun dalam rantai nilai industri di suatu wilayah.

Hubungan disparitas harga TBS dengan kesejahteraan pekebun

Data pada Tabel 5 menjelaskan tingkat pendapatan usaha kebun sawit pekebun swadaya di Kabupaten Siak periode Februari 2017. Secara umum rerata pendapatan usaha kebun sawit pekebun swadaya sebesar Rp 1.123.627 per hektar dengan rentang berkisar Rp 525.000,- hingga Rp 2.212.500,- per hektar. Hasil perhitungan indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan usaha kebun sawit swadaya di Kabupaten Siak secara umum tergolong rendah dengan nilai sebesar 0,19. Nilai tersebut lebih rendah dari hasil penelitian yang dilakukan pada 2014 oleh Susila (2004) di wilayah perkebunankelapa sawit rakyat di Kabupaten Kampar, Riau dan Musi

Banyuasin, Sumatera Selatan dengan indeks Gini sebesar 0,36. Sementara pada tingkat desa, ketimpangan pendapatan usaha kebun swadaya berkisar antara rendah hingga moderat. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat jurang distribusi pendapatan usaha kebun sawit yang besar diantara pekebun di Kabupaten Siak.

Tabel 4. Rerata harga TBS diterima pekebun swadaya dan harga ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi di Kabupaten Siak menurut umur tanaman periode Februari 2017

	Harga TBS menurut umur tanaman (Rp/Kg)					
	4 tahun	5 tahun	6 tahun	7 tahun	8 tahun	9 tahun
Harga TBS diterima pekebun	1.205	1.15	1.193	1.262	1.104	1.312
Harga ketetapan Disbun Prov	1.423	1.523	1.568	1.628	1.679	1.733
? (%)	-15	-24	-24	-22	-34	-24

Sumber: data primer, diolah

Tabel 5. Ketimpangan pendapatan usaha kebun kelapa sawit swadaya dan disparitas harga TBS di Kabupaten Siak Periode Februari 2017

No.	Desa	Pendapatan Kebun (Rp/ha)				Disparitas Harga TBS (%)
		Min	Max	Rerata	Indeks Gini	
1	Dayun (n=10)	575	1.320.000	1.011.850	0,12	6,21
2	Sungai Niur (n=6)	600	1.450.000	907.857	0,44	7,97
3	Kotoringin(n=9)	525	1.680.000	1.108.222	0,19	6,59
4	Buantan Besar (n=9)	980	1.830.000	1.328.278	0,11	4,99
5	Perawang (n=9)	700	2.100.000	1.104.444	0,22	7,57
6	Perawang Barat (n=9)	500.5	1.704.000	965.611	0,30	2,28
7	Empang Baru (n=10)	675	2.212.500	1.200.250	0,17	5,85
8	Lubuk Dalam (n=9)	605	2.175.000	1.156.944	0,22	9,30
	Total	**525**	**2.212.500**	**1.123.627**	**0,19**	**10,7**

Sumber: data primer, diolah

Data Tabel 5 juga menjelaskan nilai disparitas harga TBS yang tidak searah dengan nilai indeks Gini pendapatan usaha sawit pekebun swadaya, baik pada tingkat desa maupun Kabupaten. Sebagai contoh pada tingkat desa, nilai disparitas harga TBS di Desa Lubuk Dalam tergolong kategori tinggi sebesar 9,30%, namun nilai indeks Gini yang diperoleh tergolong rendah sebesar 0,22. Hal yang serupa terjadi pada tingkat Kabupaten Siak dimana nilai disparitas harga TBS tergolong tinggi sebesar 10,7% tetapi nilai indeks Gini pendapatan usaha sawit pekebun swadaya tergolong rendah sebesar 0,19. Hal ini menjelaskan bahwa terjadinya disparitas harga TBS belum menjamin kesejahteraan pekebun, dalam arti disparitas harga TBS diterima pekebun yang tinggi di suatu wilayah belum tentu diikuti dengan terjadinya ketimpangan pendapatan usaha kebun sawit yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

Faktor yang berpengaruh terhadap keinginan pekebun bergabung dalam organisasi

Dari pembahasan pada sub bab sebelumnya, diketahui terdapat hubungan antara faktor keikutsertaan pekebun dalam organisasi/kelompok dengan harga TBS diterima pekebun swadaya. Sementara pada faktor umur tanaman tidak terdapat hubungan dengan harga TBS yang diterima pekebun swadaya. Sub bab ini selanjutnya menjelaskan secara

statistik pengaruh antara harga TBS yang diterima pekebun dan umur tanaman terhadap keinginan pekebun bergabung dalam organisasi. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keinginan pekebun bergabung dalam organisasi/kelompok maka dilakukan analisis regresi logistik seperti disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil analisis regresi logistik

Variabel	Koefisien	Wald Test	Odds Ratio
Harga TBS	0,003[1]	0,090	1,00
Dummy Umur Tanaman	-0,673	0,338	0,50
Konstanta	-3,213	0,176	0,04

Log likelihood = -44,924;
Prob >chi2 = 0,188;
Pesudo R2 = 0,035;
Goodness of fit model Prob > chi2 = 0,056;
Ket: 1) signifikan pada tingkat kepercayan 90%

Hasil uji wald menunjukkan variabel harga TBS diterima pekebun memiliki nilai sebesar 0,090 < 0,10. Hal ini menunjukkan pada tingkat kepercayaan 90%, variabel harga TBS diterima pekebun swadaya berpengaruh terhadap keinginan pekebun bergabung dalam organisasi. Sementara nilai uji wald variabel dummy umur tanaman sebesar 0,33 > 0,1 menjelaskan bahwa pada tingkat kepercayaan 90% variabel *dummy* umur tanaman tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan organisasi pekebun. Hasil uji *goodness of fit* model memiliki nilai probabilitas sebesar 0,056 < 0,10. Hal ini menjelaskan bahwa model yang dibentuk layak digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasil regresi logistik menjelaskan bahwa harga TBS yang diterima pekebun swadaya berpengaruh terhadap keinginan pekebun bergabung dalam organisasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Stockbridge *et al.*, 2003 yang menyatakan bahwa selama koperasi mampu memberikan pelayanan berupa biaya input yang murah dan harga jual produk yang menguntungkan, para petani anggota akan loyal terhadap koperasi.

KESIMPULAN

Disparitas harga TBS sebesar 10,70% menunjukkan bahwa Kabupaten Siak mengalami disparitas harga TBS yang tinggi. Namun pada tingkat desa, hanya Desa Lubuk Dalam yang mengalami disparitas harga TBS yang tinggi sebesar 9,30%.

Nilai disparitas harga TBS yang tidak searah dengan nilai indeks Gini pendapatan usaha sawit pekebun swadaya, baik di tingkat desa maupun Kabupaten di Siak menjelaskan bahwa terjadinya disparitas harga TBS yang tinggi di suatu wilayah belum tentu diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan usaha kebun sawit, begitu pula sebaliknya.

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa keinginan pekebun bergabung dalam organisasi dipengaruhi oleh faktor harga TBS yang diterima pekebun. Terutama peran kelompok pekebun dalam mengelola pemasaran TBS para anggotanya secara kolektif dengan harga pembelian TBS yang wajar.

DAFTAR PUSTAKA

Ditjenbun. 2015. Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta.

Jati, Kumara. 2014. Staple Food Balance Sheet, Coefficient of Variation, and Price Disparity in Indonesia. Journal of Advanced Management Science Vol. 2, No. 1, March 2014

Kurniawan, A., R. Amalia, dan Z.P.S. Nasution. 2016. Tekno Ekonomi Kelapa Sawit: Kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan.

McKay, A. 2002. Defining and measuring Inequality. Inequality Briefing. Briefing Paper No. 1: 1-6. Overseas Development Institute and University of Nottingham. http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odiassets/publicationsopinionfiles/3804.pdf , diakses pada 17 Agustus 2017

Meinzen-Dick, R. and M. Di Gregorio. 2004. Collective action and property rights for sustainable development. 2020 Vision. Focus 11. Brief 1 of 16. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.

Oshima, H.T. 1976. Beberapa Perspektif dalam Pembagian Pendapatan. Prisma No 1. Februari 1976: 3-1.

Singh, J. 2011. Impact of Organized Retail Chains on Revenue of Farmer (A Case Study of Mother Dairy Centres in Haryana). New Delhi: Department of Industrial Policy And Promotion, Ministry Of Commerce & Industry, Government Of India.

Stockbridge, M., A. Dorward, and J. Kydd. 2003. Farmer organizations for market access: A briefing paper. Wye Campus, Kent, England: Imperial College, London.

Susila, W. R. 2004. Contribution of Palm Oil Industry to Economic Growth and Poverty Alleviation in Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian. 23: 107-114.

Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta.